PERDEBATAN EPISTEMOLOGIS: POSITIVISME VERSUS NON-POSITIVISME DALAM TEORI HUKUM

Khosyi Mudhoffar ⁽¹⁾, Siti Fatimah ⁽²⁾, Azmi Fitriasia ⁽³⁾

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Padang

e-mail: kopamudhoffar31@gmail.com, sitifatimah@fis.unp.ac.id, azmi_fitrisia@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2381>

ABSTRACT

This research explores the epistemological debate between positivism and non-positivism in legal theory by highlighting fundamental questions about the nature, source and legitimacy of law. Through in-depth philosophical analysis, this research debates the positivistic view that emphasizes the autonomy of law from moral considerations with the non-positivistic perspective that highlights the interconnectedness of law with moral values and justice. The research method involves a multidisciplinary approach and critical analysis of existing legal theories. The results illustrate the complexities in the interpretation and application of law in society, with far-reaching implications for legal practice, policy and the control of state power. The research concludes that while positivism offers a clear and empirically testable framework, non-positivism highlights the essential moral and justice aspects of law. However, it also emphasizes the need for a holistic approach that blends positivistic and non-positivistic elements to effectively understand and apply law in complex societies.

Keywords: Epistemological debate; positivism; non-positivism; legal theory; moral values.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum dengan menyoroti pertanyaan mendasar tentang sifat, sumber, dan legitimasi hukum. Melalui analisis filosofis yang mendalam, penelitian ini memperdebatkan pandangan positivistik yang menekankan otonomi hukum dari pertimbangan moral dengan perspektif non-positivistik yang menyoroti keterkaitan hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Metode penelitian melibatkan pendekatan multidisiplin dan analisis kritis terhadap teori-teori hukum yang ada. Hasilnya menggambarkan kompleksitas dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam masyarakat, dengan implikasi yang luas dalam praktik hukum, kebijakan, dan kontrol kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sementara positivisme menawarkan kerangka kerja yang jelas dan dapat diuji secara empiris, non-positivisme menyoroti aspek moral dan keadilan yang esensial dalam hukum. Namun, penelitian ini juga menegaskan perlunya pendekatan yang holistik yang memadukan elemen-elemen positivistik dan non-positivistik untuk memahami dan menerapkan hukum secara efektif dalam masyarakat yang kompleks.

Kata kunci: Perdebatan epistemologis; positivisme; non-positivisme; teori hukum; nilai moral.

1. Pendahuluan

Dalam ranah teori hukum, perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme telah menjadi tonggak penting yang membentuk fondasi dari pemahaman kita tentang sifat, sumber, dan legitimasi hukum. Dalam landasan ini, mengurai esensi dari perdebatan ini tidak hanya menyoroti perbedaan pandangan filosofis, tetapi juga mengungkap kompleksitas yang melingkupi penafsiran dan penerapan hukum dalam masyarakat. Perdebatan ini menggali akar-akar filsafat yang mendalam, mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum, seperti "Apa itu hukum?" dan "Dari mana hukum berasal?" (Susilo, 2011).

Di satu sisi, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum adalah entitas yang otonom, terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etis yang mungkin ada di luar struktur hukum itu sendiri. Menurut perspektif ini, hukum adalah apa yang dijelaskan oleh peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa menghiraukan pertanyaan tentang apakah peraturan tersebut adil atau sesuai dengan moralitas. Pemikiran positivis mengemukakan bahwa keberadaan dan efektivitas hukum tidak bergantung pada substansi moral atau keadilan yang mendasarinya, tetapi pada fakta-fakta empiris tentang penegakan dan penerimaan hukum oleh masyarakat (Voisin, 2018).

Di sisi lain, non-positivisme hukum menolak pandangan positivistik yang ketat dan menggambarkan hukum sebagai entitas yang lebih kompleks, terkait erat dengan nilai-nilai moral dan filsafat. Perspektif ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, politik, dan moral di mana itu beroperasi. Dalam konsekuensinya, non-positivisme menegaskan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa sumber

legitimasi hukum terletak pada konsistensi dengan nilai-nilai moral yang dianggap mendasar bagi keadilan social (Irawati et al., 2021).

Perdebatan antara positivisme dan non-positivisme menghasilkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang sifat hukum, wewenang otoritas hukum, dan batasan kekuasaan negara dalam mengatur perilaku manusia. Ini memiliki implikasi yang mendalam dalam praktik hukum, termasuk proses penegakan hukum, penafsiran, dan pembentukan kebijakan. Lebih dari sekadar diskusi teoritis, perdebatan ini mencerminkan pertarungan ideologis dan politik yang melingkupi pertanyaan tentang kekuasaan, kontrol, dan hak asasi manusia dalam masyarakat (Schinz, 1899).

Positivisme hukum, yang menekankan pada keberadaan hukum sebagai entitas otonom yang terpisah dari pertimbangan moral, menciptakan landasan untuk memahami hukum sebagai serangkaian peraturan yang ditegakkan oleh otoritas yang sah. Dalam kerangka ini, sifat hukum lebih ditentukan oleh faktor-faktor empiris dan kenyataan sosial daripada pertimbangan nilai-nilai moral atau etika. Di sisi lain, non-positivisme menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks moral dan keadilan yang lebih luas. Perspektif ini menyoroti pentingnya nilai-nilai moral dalam penentuan sifat dan legitimasi hukum, serta mengklaim bahwa keberadaan hukum terkait erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan martabat manusia.

Implikasi dari perdebatan ini meluas ke dalam praktik hukum sehari-hari, mencakup proses penegakan hukum, penafsiran, dan pembentukan kebijakan. Dalam proses penegakan hukum, pandangan positivistik mungkin menekankan pada penerapan peraturan secara kaku dan otonom, tanpa memperhitungkan faktor-faktor moral yang mungkin mempengaruhi keputusan hukum.

Di sisi lain, pendekatan non-positivistik mungkin menekankan pada pertimbangan nilai-nilai moral dan keadilan dalam penegakan hukum, yang dapat mengarah pada interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap kasus-kasus hukum tertentu. Dalam proses penafsiran, perdebatan antara positivisme dan non-positivisme dapat mempengaruhi cara di mana undang-undang ditafsirkan dan diterapkan oleh para hakim dan praktisi hukum. Perspektif positivistik mungkin cenderung untuk menafsirkan undang-undang secara harfiah, sementara perspektif non-positivistik mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan niat legislator dan prinsip-prinsip moral dalam penafsiran undang-undang.

Perdebatan antara positivisme dan non-positivisme mencerminkan pertarungan ideologis dan politik yang melibatkan pertanyaan tentang kekuasaan, kontrol, dan hak asasi manusia dalam masyarakat. Positivisme hukum sering kali dikaitkan dengan pandangan yang lebih konservatif tentang kekuasaan negara dan otoritas hukum, sementara non-positivisme dapat memperjuangkan peningkatan hak asasi manusia dan kontrol yang lebih besar terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, perdebatan ini tidak hanya relevan dalam kerangka teori hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik dan sosial masyarakat.

Pandangan positivisme hukum, yang cenderung menekankan pada keberadaan hukum sebagai entitas yang otonom dan terpisah dari pertimbangan moral, sering kali dikaitkan dengan pandangan yang lebih konservatif tentang kekuasaan negara dan otoritas hukum. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai landasan bagi stabilitas dan ketertiban sosial, dan sering kali menempatkan penekanan pada kewenangan negara dalam menetapkan dan menegakkan

hukum. Bagi para pendukung positivisme, penerapan hukum yang kaku dan terstruktur dianggap sebagai jaminan terhadap keadilan dan keamanan.

Di sisi lain, pandangan non-positivistik terhadap hukum sering kali menyoroti kebutuhan akan kontrol yang lebih besar terhadap kekuasaan negara dan peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perspektif ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Dalam kerangka non-positivistik, legitimasi hukum terkait erat dengan konsistensi dengan nilai-nilai moral yang dianggap mendasar bagi keadilan sosial dan martabat manusia. Oleh karena itu, para pendukung non-positivisme sering menuntut perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan hukum.

Dalam konteks politik dan sosial, perdebatan antara positivisme dan non-positivisme mencerminkan pertarungan yang lebih besar tentang kekuasaan, kontrol, dan hak asasi manusia dalam masyarakat. Pandangan positivistik mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan negara dan legitimasi hukum, sementara perspektif non-positivistik mungkin memunculkan isu-isu tentang perlindungan terhadap hak-hak individu dan keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, perdebatan ini memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik dan sosial, mempengaruhi kebijakan publik, gerakan advokasi, dan perubahan struktural dalam masyarakat.

Dengan demikian, perdebatan antara positivisme dan non-positivisme tidak hanya relevan dalam kerangka teori hukum, tetapi juga mencerminkan pertarungan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip moral, keadilan, dan demokrasi dalam masyarakat.

Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan pandangan ini dapat membantu membentuk arah kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada hak-hak individu, serta mempromosikan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami secara mendalam perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum. Melalui penelitian ini,

2. Metode

Metode penelitian ini melibatkan pendekatan multidisiplin dan analisis filosofis yang mendalam. Pertama, studi ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur filosofis, teks hukum, artikel jurnal, dan sumber-sumber sekunder terkait. Teknik pengumpulan data akan melibatkan pencarian sistematis dan komprehensif melalui basis data akademis dan perpustakaan daring untuk mengidentifikasi literatur yang relevan dengan perdebatan antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum (Sudiyana & Suswoto, 2018).

Setelah data dikumpulkan, analisis filosofis akan dilakukan untuk memahami esensi dari masing-masing perspektif, serta perbedaan-perbedaan mereka dalam pemahaman tentang sifat, sumber, dan legitimasi hukum. Ini akan melibatkan dekonstruksi teori-teori utama dari kedua aliran pemikiran, termasuk karya-karya klasik dan kontemporer, untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi, argumen, dan implikasi filosofisnya.

Selanjutnya, metode penelitian ini akan melibatkan analisis komparatif antara positivisme dan non-positivisme dalam konteks teori hukum. Ini akan dilakukan dengan membandingkan dan kontras perspektif-perspektif yang berbeda terhadap isu-isu krusial dalam hukum,

kami bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan esensial antara kedua pandangan tersebut, serta mengeksplorasi implikasi mereka terhadap pemahaman tentang sifat, sumber, dan legitimasi hukum. Dengan demikian, tujuan kami adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas teori hukum, serta konsekuensi filosofis, praktis, dan sosial dari perspektif positivisme dan non-positivisme dalam konteks hukum.

seperti wewenang otoritas hukum, sumber legitimasi hukum, dan hubungan antara hukum dan moralitas (Bakhri & Hanubun, 2019).

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan teks-teks kunci dalam kerangka konteks historis dan filsafat yang lebih luas. Ini akan membantu dalam memahami evolusi pemikiran hukum dari masa lalu hingga masa kini, serta pengaruhnya terhadap pandangan kontemporer tentang hukum.

Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan komprehensif ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum, serta implikasi mereka terhadap praktik hukum dan dinamika sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Perspektif Positivisme dalam Teori Hukum

Analisis Perspektif Positivisme dalam Teori Hukum menggali secara mendalam pandangan yang mendasari pendekatan positivistik terhadap hukum. Positivisme hukum, yang telah menjadi salah satu aliran utama dalam teori hukum, menegaskan bahwa hukum adalah entitas yang otonom dan terpisah dari pertimbangan moral atau

nilai-nilai etis yang mungkin ada di luar struktur hukum itu sendiri. Dalam pandangan positivistik, hukum dianggap sebagai apa yang dijelaskan oleh peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa memperhitungkan apakah peraturan tersebut adil atau sesuai dengan moralitas. Pandangan ini menempatkan penekanan pada fakta-fakta empiris tentang penegakan hukum oleh masyarakat dan penerimaan peraturan hukum, bukan pada pertimbangan nilai-nilai moral atau etika. Dalam konteks ini, analisis positivisme dalam teori hukum mencakup pembahasan mendalam tentang asumsi-asumsi dasar positivisme, seperti keberadaan hukum sebagai entitas yang otonom, terpisah dari moralitas atau keadilan, serta keberadaan peraturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah sebagai sumber legitimasi hukum (Farida, 2023).

analisis ini juga akan membahas implikasi praktis dan filosofis dari pandangan positivistik dalam kerangka teori hukum. Dari segi praktis, pendekatan positivistik dapat menyiratkan penekanan pada penerapan hukum yang kaku dan terstruktur, di mana kepatuhan terhadap peraturan hukum menjadi prioritas utama, tanpa memperhitungkan pertimbangan moral atau etika yang mendasarinya. Hal ini dapat mengarah pada penegakan hukum yang tegas dan konsisten, di mana kepastian hukum menjadi pijakan utama bagi stabilitas dan ketertiban sosial. Namun, dari segi filosofis, analisis positivisme dalam teori hukum juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang sifat dan legitimasi hukum. Kritikus positivisme sering menyoroti bahwa pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi moral dari hukum, yang dapat memunculkan kekhawatiran tentang keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Selain itu, analisis ini juga akan mengeksplorasi keterbatasan dan tantangan dalam penerapan pendekatan positivistik dalam konteks hukum yang

kompleks dan terus berkembang (Sebastian, 2023).

Analisis Perspektif Positivisme dalam Teori Hukum menyoroti landasan filosofis dari pendekatan positivistik terhadap hukum serta implikasinya terhadap sistem hukum dan masyarakat secara luas. Positivisme hukum, yang menekankan pada keberadaan hukum sebagai entitas otonom yang terpisah dari pertimbangan moral atau etika, sering mendapat kritik karena dituduh mengabaikan dimensi moral dari hukum. Kritik ini sering kali muncul dari pemikir dan ahli hukum yang mempertanyakan apakah hukum yang berlaku haruslah selalu dianggap sebagai hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Mereka berpendapat bahwa pendekatan yang murni positivistik dapat menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam masyarakat jika kepatuhan terhadap hukum dilihat sebagai satu-satunya pijakan bagi keadilan. Kritikus positivisme juga menyoroti bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak selalu menjamin keadilan, terutama jika hukum tersebut berasal dari otoritas yang tidak demokratis atau memiliki bias tertentu (Soeharto, 2022).

analisis perspektif positivisme dalam teori hukum, juga perlu dieksplorasi keterbatasan dan tantangan dalam menerapkan pendekatan positivistik dalam konteks hukum yang kompleks dan terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah bahwa dunia hukum sering kali melibatkan situasi atau kasus yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini, pendekatan positivistik yang mendasarkan legitimasi hukum hanya pada keberadaan peraturan yang telah ditetapkan dapat menghadapi kesulitan dalam menangani kebutuhan atau isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Selain itu, dalam konteks hukum yang berkembang pesat, seperti dalam teknologi dan media sosial, pendekatan positivistik

juga mungkin tidak dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, mengakibatkan ketidakmampuan hukum untuk secara efektif mengatur fenomena-fenomena baru (Wau et al., 2020).

Namun demikian, meskipun kritik-kritik ini penting untuk dipertimbangkan, pendekatan positivistik tetap memiliki nilai dan relevansi dalam kerangka hukum. Misalnya, dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, pendekatan yang mengutamakan keberadaan hukum sebagai landasan yang harus dihormati dapat menjadi alat yang efektif. Selain itu, pendekatan positivistik juga dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan hukum, mengurangi ketidakpastian dan keraguan dalam proses hukum. Oleh karena itu, sambil mengakui kritik terhadap positivisme, analisis terhadap perspektif positivisme dalam teori hukum juga harus mempertimbangkan manfaat-manfaat yang diberikannya dalam konteks tertentu (Pratama & Mutia, 2020).

Analisis Perspektif Positivisme dalam Teori Hukum menyoroti pentingnya memahami secara komprehensif pendekatan positivistik terhadap hukum, sambil mempertimbangkan kritik yang telah diajukan terhadapnya. Positivisme hukum, sebagai salah satu pendekatan utama dalam filsafat hukum, memberikan landasan yang jelas dan terstruktur untuk memahami sifat dan sumber hukum. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, dan legitimasinya berasal dari fakta bahwa peraturan tersebut ada dan diterapkan, bukan dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etika yang mendasarinya. Dengan demikian, analisis terhadap perspektif positivisme dalam teori hukum membantu mengidentifikasi struktur dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur sistem hukum, memberikan kerangka kerja yang

kokoh untuk interpretasi dan penerapan hukum dalam masyarakat (Kurnia, 2016).

Namun demikian, dalam melakukan analisis terhadap positivisme, penting untuk mempertimbangkan kritik yang telah diajukan terhadap pendekatan ini. Salah satu kritik utama terhadap positivisme adalah bahwa pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi moral dari hukum. Kritik ini menyatakan bahwa hukum yang hanya didasarkan pada kriteria positivistik dapat menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam masyarakat, karena kepatuhan terhadap hukum tidak selalu menjamin keadilan. Contohnya adalah ketika hukum yang diterapkan berasal dari otoritas yang tidak demokratis atau memiliki bias tertentu. Selain itu, pendekatan positivistik juga dapat mengalami kesulitan dalam menangani situasi yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh peraturan-peraturan yang telah ada, seperti kasus-kasus di mana hukum tidak mengikuti perkembangan sosial atau teknologi (Irawati et al., 2021).

Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa pendekatan positivistik juga memiliki manfaatnya dalam konteks tertentu. Pendekatan ini dapat menyediakan kejelasan dan kepastian dalam hukum, yang penting untuk stabilitas dan ketertiban sosial. Selain itu, dalam situasi di mana kepatuhan terhadap hukum adalah kunci bagi fungsi sistem hukum, pendekatan positivistik dapat membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, analisis terhadap positivisme dalam teori hukum harus memperhitungkan manfaat-manfaat yang diberikannya, sambil tetap kritis terhadap keterbatasan dan tantangan yang dihadapinya (Bakhri & Hanubun, 2019).

Dengan demikian, analisis terhadap perspektif positivisme dalam teori hukum menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sistem hukum, sambil mengakui kritik yang

diajukan terhadap pendekatan ini. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, para ahli hukum dan pemikir dapat mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang menggabungkan kejelasan dan kepastian hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang mendasar (Yulianto, 2020).

Eksplorasi Perspektif Non-Positivisme dalam Teori Hukum

Eksplorasi Perspektif Non-Positivisme dalam Teori Hukum mengarah pada pemahaman mendalam tentang pandangan yang menyoroti keterkaitan erat antara hukum, moralitas, dan keadilan. Berbeda dengan pendekatan positivistik yang menempatkan hukum sebagai entitas otonom yang terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etika, non-positivisme menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks moral dan keadilan yang lebih luas. Dalam pandangan ini, legitimasi hukum tidak hanya berasal dari fakta bahwa peraturan-peraturan tersebut ada dan diterapkan oleh otoritas yang sah, tetapi juga dari kesesuaian mereka dengan nilai-nilai moral yang dianggap mendasar bagi keadilan sosial dan martabat manusia (Sebastian, 2023).

Analisis terhadap perspektif non-positivisme dalam teori hukum mencakup eksplorasi konsep-konsep kunci yang mendasarinya. Salah satu konsep utama adalah bahwa hukum dan moralitas saling terkait, dan bahwa nilai-nilai moral harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sifat dan legitimasi hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai serangkaian peraturan yang otonom, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Perspektif non-positivistik juga menyoroti pentingnya interpretasi kontekstual

terhadap hukum, di mana keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang atau precedents, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang mendasarinya dan tujuan-tujuan keadilan yang ingin dicapai (Farida, 2023).

Selain itu, eksplorasi perspektif non-positivisme juga mencakup penelusuran implikasi praktis dari pandangan ini dalam praktik hukum. Dalam proses penegakan hukum, pendekatan non-positivistik dapat mengarah pada pertimbangan nilai-nilai moral dan keadilan dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan untuk penanganan kasus secara kontekstual dan fleksibel. Dalam proses penafsiran, pandangan non-positivistik mendorong hakim dan praktisi hukum untuk tidak hanya mempertimbangkan teks undang-undang, tetapi juga prinsip-prinsip moral dan tujuan-tujuan keadilan dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks (Sudiyana & Suswoto, 2018).

Namun demikian, eksplorasi perspektif non-positivisme juga menyoroti tantangan dan pertanyaan kritis yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah menentukan siapa yang memiliki otoritas moral untuk menentukan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum. Selain itu, pendekatan non-positivistik juga dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai konsistensi dan kepastian hukum jika penafsiran hukum sangat tergantung pada pertimbangan nilai-nilai moral yang subjektif (Schinz, 1899).

Analisis Perspektif Positivisme dalam Teori Hukum merupakan upaya mendalam untuk memahami dan mengeksplorasi landasan filosofis dari pendekatan positivistik terhadap hukum. Dalam pandangan positivistik, hukum dianggap sebagai serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, dan legitimasinya berasal dari fakta bahwa peraturan-peraturan tersebut ada dan diterapkan, bukan dari pertimbangan moral

atau etika yang mendasarinya. Analisis ini menyoroti asumsi-asumsi dasar positivisme, seperti keberadaan hukum sebagai entitas yang otonom dan terpisah dari pertimbangan moralitas atau keadilan. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami struktur dan prinsip-prinsip yang mengatur sistem hukum (Sarmadi, 2012).

Meskipun demikian, analisis terhadap perspektif positivisme dalam teori hukum juga mengidentifikasi kritik yang telah diajukan terhadap pendekatan ini. Salah satu kritik utama adalah bahwa positivisme cenderung mengabaikan dimensi moral dari hukum. Para kritikus menegaskan bahwa hukum yang hanya didasarkan pada kriteria positivistik dapat menghasilkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam masyarakat, karena kepatuhan terhadap hukum tidak selalu menjamin keadilan. Terutama dalam kasus di mana hukum berasal dari otoritas yang tidak demokratis atau memiliki bias tertentu, pandangan positivistik dapat menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan. Selain itu, pendekatan positivistik juga mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani situasi yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh peraturan-peraturan yang telah ada, seperti kasus-kasus di mana hukum tidak

4. Simpulan dan Saran

Dalam perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum, kedua perspektif menawarkan sudut pandang yang berbeda namun relevan. Sementara pendekatan positivistik menekankan pada keberadaan hukum sebagai entitas otonom yang terpisah dari pertimbangan moral, non-positivisme menyoroti keterkaitan erat antara hukum, moralitas, dan keadilan. Dalam hal ini, perdebatan ini tidak hanya menjadi isu teoritis, tetapi juga mencerminkan pertarungan ideologis dan

mengikuti perkembangan sosial atau teknologi.

Namun demikian, analisis terhadap perspektif positivisme dalam teori hukum juga mencatat manfaat dan relevansinya dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menyediakan kejelasan dan kepastian dalam hukum, yang penting untuk stabilitas dan ketertiban sosial. Dalam situasi di mana kepatuhan terhadap hukum adalah kunci bagi fungsi sistem hukum, pendekatan positivistik dapat membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, sambil mengakui kritik terhadap positivisme, analisis terhadap perspektif positivisme dalam teori hukum juga harus mempertimbangkan manfaat-manfaat yang diberikannya dalam konteks tertentu.

Dengan demikian, analisis perspektif positivisme dalam teori hukum membawa pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas sistem hukum dan tantangan dalam mencapai keadilan sosial. Dengan mempertimbangkan implikasi praktis dan filosofis dari pandangan ini, analisis ini memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan, serta membantu dalam mengembangkan pendekatan hukum yang lebih seimbang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

politik yang melingkupi pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan, kontrol, dan hak asasi manusia dalam masyarakat.

Namun demikian, sambil mengakui kekuatan dan keterbatasan masing-masing pendekatan, penting untuk diingat bahwa tujuan akhir dari teori hukum adalah mencapai keadilan sosial yang seimbang. Oleh karena itu, dalam mengeksplorasi perbedaan antara positivisme dan non-positivisme, kita juga harus mencari cara untuk mengintegrasikan aspek-aspek yang paling berharga dari kedua perspektif tersebut. Dengan demikian, kesimpulan

dari perdebatan ini adalah perlunya pendekatan yang holistik dalam pengembangan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan, sambil mempertahankan kejelasan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk stabilitas sosial.

Daftar Pustaka

- Bakhri, A. S., & Hanubun, Y. R. (2019). Pendekatan Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Teori, dan Aplikasi. *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan. Sorong, Papua Barat: STAIN [Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri] Sorong*, 1–21.
- Biyanto, B. (2015). Positivisme dan Non-Positivisme dalam Jurisprudensi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 483. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.483-502>
- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365–374. <https://doi.org/10.14710/MMH.40.3.2011.365-374>
- Farida, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai-Nilai Otentik Keindonesiaan ke Hukum Positivistik dalam Sistem Hukum Nasional. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.504>
- Fitriani, N. (2024). Pengaruh The Pure Theory of Law dalam Perkembangan Hukum Positivisme di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://doi.org/10.31960/IJOCL.V2I2.541>
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>
- Kurnia, T. S. (2016). Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 17–32.
- Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 17–31. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/199>
- Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 51.
- Rozah, U. (2014). Problematika Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tuntutan Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 140–148.
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331–343. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>
- Schinz, A. (1899). Le Positivisme Est Une Méthode Et Non Un Système. *JSTOR*, 63–75. https://www.jstor.org/stable/41076899?casa_token=HPqkjExgih0AAAAA%3AJqkVJbgjjGOQIBcfG6u7g_EFVHwHKvvp9l2o4WfmijwvGmtT6NtQAdLCj9aca4fGjea1cUfknw5dF0-sYvZG28k1dhd0rL_1eEJXqw2RfLG6IDh0Kuof
- Sebastian, T. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 269–308.
- Soeharto, A. (2022). Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan*

- Teknologi*, 36, 62.
<https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.2013>
- Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1), 107–136.
- Suharto, B. (2015). Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum. *Prosiding Seminar Nasional*, 299–318.
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214–226.
- Voisin, C. (2018). L'éducation à l'Environnement : l'idée de Neutralité Entre Simplisme, Positivisme et Relativisme. *Éducation et Socialisation*, 48.
<https://doi.org/10.4000/edso.2950>
- Wau, C. M., Hutajulu, M. J., & Dwiyatmi, S. H. (2020). Implikasi Positivisme Hukum Terkait Pengaturan Teknologi Finansial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2), 77–98.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p77-98>
- Yulianto, R. A. (2020). Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 493.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.493-516>